



## **PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG DI KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

### *REGIONAL EMPOWERMENT PROGRAM FOR COMMUNITY COOPERATION IN TALIWANG SUBDISTRICT, WEST SUMBAWA REGENCY*

**M. Saleh**

Universitas Mataram

Email: [msalehfhunram@gmail.com](mailto:msalehfhunram@gmail.com)

**Khair**

Universitas Mataram

Email: [abdulkhair@unram.ac.id](mailto:abdulkhair@unram.ac.id)

**Kafrawi**

Universitas Mataram

Email: [kafrawifh@unram.ac.id](mailto:kafrawifh@unram.ac.id)

**M. Alfian F**

Universitas Mataram

Email: [alfian@unram.ac.id](mailto:alfian@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk melihat Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa data yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan Peran Sticholder yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan gotong royong sesuai dengan harapan pemda setempat sesuai dengan peraturan perundang-indangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan, Gotong Royong*

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to examine the Regional Empowerment Program of Community Cooperation in Taliwang Subdistrict, West Sumbawa Regency. The research method used is empirical research with a legislative and conceptual-sociological approach, and the data analysis involves legislative interpretation and authentic interpretation as well as field data. The results of this research are expected to align the roles of stakeholders directly involved in the community cooperation empowerment program with the expectations of the local government in accordance with the prevailing legal regulations.*

**Keywords:** *Empowerment, Community Cooperation.*

#### **PENDAHULUAN**

Gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa yang mengandung nilai dan semangat kebersamaan, persatuan, dan tolong menolong yang menjadi kekuatan

besar dalam mewujudkan pembangunan sehingga perlu dilestarikan dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong menjadi sarana efektif dan efisien dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan memperkokoh jiwa nasionalisme serta integrasi sosial.

Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan mewujudkan pembangunan yang terencana, terukur, terarah dan berkesinambungan serta dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat, perlu merevitalisasi gotong royong dan menjadikannya sebagai program daerah guna mendorong partisipasinya secara aktif dan produktif dalam setiap rangkaian proses pembangunan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Dalam globalisasi saat ini, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah karena terdapat perubahan sosial masyarakat dan pergeseran nilai-nilai yang berlangsung begitu cepat. Pergeseran nilai ini berlangsung pada level negara dan masyarakat. Pada level negara, contohnya perubahan terlihat dari pola kebijakan dan orientasi pembangunan yang berlandaskan gotong royong, musyawarah mufakat dan orientasi pada kepentingan publik, kini sekarang mulai bergeser pada kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Proses pemberdayaan atau pengembangan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya untuk bertahan mengembangkan diri secara mandiri.<sup>1</sup>

Berbagai konsep dan program pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Diantaranya program-program yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dijabarkan melalui program pembangunan sektoral, pembangunan regional, dan pembangunan khusus. Program-program yang dilakukan tersebut sifatnya top-down, sangat sentralistik, dan tidak banyak melibatkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Peran birokrasi dan intervensi pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan dampak negatif untuk kepentingan jangka pendek. Adanya realita negatif yang berkembang di masyarakat, telah mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi serta revitalisasi atas konsep pembangunan.<sup>2</sup>

Dari berbagai rekomendasi yang ditawarkan yang banyak dikemukakan adalah perlunya menciptakan kebijakan makro yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, penyesuaian kebijakan sektoral, menciptakan efisiensi dan kepekaan terhadap pasar serta mengurangi rigiditas birokrasi dan intervensi pemerintah dalam interaksi ekonomi.<sup>3</sup> Selain itu, diperulakan perubahan filosofi dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi, pola pembangunan dengan konsep top-down planning menjadi bottom-up planning, uniformity menjadi variasi lokal, sistem komando menjadi proses pembelajaran, ketergantungan menjadi keberlanjutan, social exclusion menjadi social inclusion, dan improvement menjadi transformation.<sup>4</sup>

Pemberdayaan masyarakat melalui program pada era globalisasi ini tentunya memberikan tantangan yang besar kepada pemerintah, dimulai dengan melihatnya kondisi ketidakstabilan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan kultural yang tampak sangat nyata, adanya degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. Dengan tantangan ini tentunya akan memacu pemerintah untuk membuat suatu kebijakan atau program yang dapat tepat sasaran, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi

1 Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani, *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang*, Jurnal Civic Hukum, Vol. 4 No.2 November 2019, hlm 109-111

2 Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm 10

3 Safi'i, 2011, *Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif Teori dan Praktek*, Averroes Press, Malang, Hlm

4 Soetomo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 32

pada masyarakat. Sehingga tidak heran jika pemberdayaan ini tidak dapat di capai dalam waktu sekejap, melainkan melalui sebuah proses yang tidak singkat.

Untuk memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembang dengan baik serta menentukan arah penguatan gotong royong dan mewujudkannya sebagai program daerah yang berhasil guna dan berdaya guna serta percepatan pengentasan kemiskinan, perlu landasan hukum yang menjamin kepastian Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong sebagai sarana pembangunan partisipatif yang aktif dan produktif di Kabupaten Sumbawa Barat. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong merupakan aksi daerah dalam mewujudkan agenda Nawacita dan Trisakti yang disinergikan sebagai gerakan kerja aparatur dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dengan bersama-sama mengaktualisasikannya secara Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Tentang Program Daerah Gotong Royong

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) merupakan salah satu program unggulan yang dicetuskan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan maksud, merevitalisasi kembali budaya bangsa (gotong royong) untuk dijadikan sebagai ciri Bangsa Indonesia dan merupakan agenda dalam melakukan pengentasan kemiskinan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat, seperti yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, yakni :<sup>5</sup>

1. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsive berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong.
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.
3. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat.
4. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi.
5. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.
6. Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, 2017–2021

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sekongkang	8	8	8	8	8
Jereweh	4	4	4	4	4
Maluk	5	5	5	5	5
Taliwang	15	15	15	15	15
Brang Ene	6	6	6	6	6
Brang Rea	9	9	9	9	9

Seteluk	10	10	10	10	10
Poto Tano	8	8	8	8	8
Sumbawa Barat	65	65	65	65	65

Catatan/Note: Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Include Transmigration Settlement Unit

Sumber/Source: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2021/Chief Statistician Regulation Number 5/2021, December 30 2021, as a revision of Chief Statistician Regulation Number 1 of 2021 on Code and Name of Regional Level of Data Collection.

### **Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Desa Labuan Kertasari Kecamatan Taliwang**

Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat adalah masyarakat yang sangat menjunjung perilaku gotong royong dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Melihat hal tersebut pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membuat dan menetapkan suatu Peraturan Daerah yang berbasiskan gotong royong. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat adalah faktor pendukung pelaksanaan program dari Peraturan Daerah karena penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Labuan Kertasari mengatakan bahwa:

*“Untuk tahun ini program PDPGR stimulan dan padat karya belum ada dan untuk tahun-tahun yang lalu sudah dilaksanakan program-program seperti program Pariri Disabilitas, Pariri Lansia. Jambanisasi dan bariri UMKM. Dari Program Pariri Lansia dan Pariri Disabilitas di Desa Labuan Kertasari masyarakat yang menerima 65 orang sedangkan untuk program bariri UMKM masyarakat yang menerima berjumlah 21 Orang”<sup>6</sup>*

Dari hasil wawancara penulis dengan informan diatas, bahwa selama ini di Desa Labuan Kertasari telah terlaksana 4 Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Berarti partisipasi masyarakat di Desa Labuan Kertasari sangat baik karena menerima program-program dari pemberdayaan gotong royong tersebut dengan baik. Data penerima bantuan UMKM dapat dilihat di tabel di bawah ini:

NO	NAMA PENERIMA	DESA/KELURAHAN	JENIS USAHA
1	Andi Mariam	Labuhan Kertasari	Jual Pulsa
2	Liza Umawi	Labuhan Kertasari	Jual Pulsa
3	Andi Caya	Labuhan Kertasari	Kios Sembako
4	Nur Asiah	Labuhan Kertasari	Jual Pulsa
5	Firman	Labuhan Kertasari	Rumput Laut
6	Rosdiana	Labuhan Kertasari	Rumput Laut

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Julianto selaku Sekdes Desa Labuan Kertasari, pada tanggal 13 Juni 2023. Desa Labuan Kertasari

7	Rosintan	Labuhan Kertasari	Jual Beli Sembako
8	Linda	Labuhan Kertasari	Jual Beli Sembako
9	Ratna Kati	Labuhan Kertasari	Usaha Tenun
10	Nurintan, Hs	Labuhan Kertasari	Jual Beli Sembako
11	Andi Ratna	Labuhan Kertasari	Jual Beli Jajan
12	Siamik	Labuhan Kertasari	Warung Makan
13	Herlina	Labuhan Kertasari	Usaha Tenun
14	Khaerol	Labuhan Kertasari	Jual Beli Sembako
15	Marlin	Lab. Kertasari	Jual Beli Bahan Sembako
16	Dea Intan	Lab. Kertasari	Budi Daya Rumput Laut
17	Leliana	Lab. Kertasari	Jual Beli Pulsa
18	Suganti	Lab. Kertasari	Pedagang Kue
19	Misbahul Aini	Lab. Kertasari	Pedagang Kue
20	Siti Ramlia	Lab. Kertasari	Jual Beli Bahan Sembako
21	Rusna Intan	Lab. Kertasari	Pedagang Kue
JUMLAH		67.000.000	

Sumber : Dinas koperindag Kabupaten Sumbawa Barat 2022

### **Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Desa Seloto Kecamatan Taliwang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jalaluddin selaku Kepala Desa Seloto menjelaskan bahwa:

*“Terkait dengan pelaksanaan program PDPGR di Desa Seloto telah berjalan baik. Hambatan-hambatan dalam setiap pelaksanaannya tetap ada. Karena hambatan dalam setiap pelaksanaan suatu program pemerintah daerah selalu ada. Namun hal tersebut menjadi dorongan buat pemerintah Desa membantu terlaksananya program Daerah untuk mensejahterahkan masyarakat. Serta partisipasi masyarakat sangat baik sekali yang dikarenakan kami sebagai pemerintah tetap turun lapangan untuk memberikan pencerahan dari semua aspek. Dan Program PDPGR yang telah terlaksana di Desa Seloto ini dari tahun 2019 hingga 2022 yaitu Pariri Lansia, Pariri Disabilitas dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)”<sup>7</sup>*

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, Pemerintah Desa sangat merespon dengan baik terhadap diberlakukannya Peraturan Daerah pemberdayaan gotong royong tersebut, begitu pula mendapat respon yang baik dari masyarakat, contohnya salah satu responden mengatakan dia sangat terbantu dengan bantuan program daerah pemberdayaan gotong royong yang diberikan kepadanya. Program yang sudah terlaksana tersebut diantaranya yaitu program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pariri Lansia dan Pariri Disabilitas. Untuk data penerima dari program-program tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Jalaludin selaku Kepala Desa Seloto. Kantor Desa Seloto, kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	Bandariah	Rt.01 Rw.01 Dusun Brang Bullu	2021
2	Banda	Rt.02 Rw.02 Dusun Brang Bulu	
3	Adamuddin	Rt.01 Rw.03 Dusun Brang Pandang	
4	Soraya	Rt.01 Rw.03 Dusun Brang Pandang	
5	Nursian	Rt.02 Rw.05 Dusun Lenang Late	
6	Masjayaton	Rt.02 Rw.06 Dusun Lenang Late	
7	Hawa Inok	Rt.01 Rw.01 Dusun Brang Bulu	2022
8	Khairuman	Rt.02 Rw.04 Dusun Brang Pandang	
9	Arif Rahman Hakim	Rt.02 Rw.03 Dusun Brang Pandang	
10	Hafsah	Rt.02 Rw.06 Dusun Lenang Late	

Sumber : Sekretaris Desa Seloto 2022

### **Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Desa Sermong Kecamatan Taliwang**

Pemberdayaan gotong royong sebagai program unggulan daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sangat ditentukan keberhasilan pelaksanaannya oleh adanya pemberdayaan kapasitas kelembagaan pengelola Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sermong mengatakan bahwa :

*“Sampai dengan sekarang selama saya bertugas sebagai Kepala Desa belum ada sama sekali implementasinya di tengah masyarakat di awal masa jabatan saya, ada program yang dilaksanakan tapi hanya sedikit tapi itu bukan program dari PDPGR tapi memang bantuan rumah pasca gempa, setelah itu selsai sampai dengan sekarang mau yang stimulant maupun padat karya itu belum ada. Serta Agen PDPGR di Desa Sermong ini juga tertutup dalam artian mereka tertutup dengan agenda agenda program dari daerah, sehingga agen ini warna baru yang tidak bisa diliat oleh masyarakat. masyarakat hanya tau agen ini ketika mereka datang mendata”,<sup>8</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sermong tersebut bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Desa Sermong belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Dalam Pasal 25 ayat 6 dan 7 menjelaskan bahwa hasil musyawarah rencana pelaksanaan program gotong royong agen membuat berita acara dan diserahkan kepada Kepala Desa. Implementasi dari Peraturan Daerah dilapangan agen dari Kecamatan sekaligus Pembina Dalam pelaksanaan PDPGR tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Desa Sermong dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Dan pihak Pemerintah Desa Sermong mengetahui program PDPGR dari masyarakat ketika agen-agen mendata masyarakat yang ada di Desa Sermong.

8 Hasil wawancara dengan Rosidi Selaku Kepala Desa Sermong Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.

NO	NAMA PENERIMA	DESA/ KELURAHAN	JENIS USAHA
1	Arie Gustina,S.pd	Sermong	jual sprei / bedcover/ selimut
2	Bahiyah	Sermong	sembako/kios
3	Bandi	Sermong	pengrajin bambu
4	Rabi'ah	Sermong	jual ikan
5	Fatmawati	Sermong	sembako/kios
6	Hafid yusuf	Sermong	sembako/kios
7	Hafsah	Sermong	sembako/kios
8	Hj. Sahariah	Sermong	sembako/kios
9	Irfan jaya	Sermong	Perbengkelan
10	Jamaluddin	Sermong	penggemukan ternak
11	Junisa	Sermong	pengrajin bambu
12	Mariani	Sermong	Loundry
13	Maryam	Sermong	sembako/kios
14	Masrang muluk	Sermong	Pertukangan
15	Mindarti	Sermong	pengrajin bambu
16	Muhammad syaiful	Sermong	kripik balado
17	Novita sari	Sermong	Pertukangan
18	Nurdin	Sermong	Menjahot
19	Nurhayati	Sermong	sembako/kios
20	Nurnaningsih	Sermong	kios/bakulan
21	Rizka teja sukrawati	Sermong	barang lipat/alat rumah tangga
22	Saniya	Sermong	Bakulan
23	Saranti	Sermong	barang lipat
24	Sendawan	Sermong	pembuatan kue
25	Siti aisyah	Sermong	pengrajin bambu
26	Srilah m. Ali	Sermong	sembako/kios
27	Sulaiman	Sermong	sembako/kios
28	Sumiati	Sermong	jual ikan
29	Sumiati	Sermong	sembako/kios
30	Sundari	Sermong	pembuatan krupuk
31	Supiatun	Sermong	pembuatan krupuk
32	Suryati	Sermong	kios/bakulan
33	Hasan	Sermong	kios/bakulan

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Sumbawa Barat 2022

### **Kendala yang di hadapi serta solusinya dalam pelaksanaan program**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari program Daerah Gotong Royong yang dilakukan di 3 (tiga) sampel di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat tersebut, temui beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Faktor Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan program-program dari Peraturan Daerah tersebut karena masih banyak masyarakat Desa Labuan Kertasari, Desa Sermong dan Seloto yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah gotong royong dan program-programnya. Masyarakat Desa Labuan Kertasari, Desa Sermong dan Seloto hanya mengetahui program padat karya yang di sosialisasikan oleh agen penggerak program daerah gotong royong.
- 2) Kurangnya Koordinasi antara agen dari Kecamatan Taliwang dengan Pemerintah Desa Sermong serta agen yang ditempatkan di masing-masing Desa.
- 3) Faktor dana yang belum terealisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat karena dialihkan untuk dana Covid-19 di Kecamatan Taliwang sehingga Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong tidak dapat terlaksana.
- 4) Adanya keinginan dari masyarakat yang ekonominya lebih baik untuk mendapatkan program pemberdayaan gotong royong dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 5) Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan timbulnya hambatan atau masalah koordinasi karena beberapa pihak, terutama agen pemberdayaan gotong royong juga terlibat pada kegiatan lain;
- 6) Terbatasnya waktu antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mengakibatkan pemahaman masyarakat calon penerima program *stimulant* dan padat karya masih sangat terbatas;
- 7) Adanya calon penerima bantuan program daerah pemberdayaan gotong royong yang lolos padahal tidak memenuhi persyaratan sebagai calon penerima program *stimulan* padat karya.

Solusi terhadap kendala tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah harus mensosialisasikan kembali secara merata di setiap Desa maupun RT setempat alur atau tata cara dalam pelaksanaan program *stimulan*, padat karya dan terutama Gotong Royong Mandiri.
- 2) Setiap agen harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah Desa hingga tingkat Peliuk sehingga mempermudah kesuksesan program-program yang dijalankan.
- 3) Pencairan dana dari Pemerintah Daerah supaya dipercepat apabila program-program yang sudah di usulkan sudah di setujui agar program yang di usulkan segera terlaksana
- 4) Pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan program baik itu program stimulan dan padat karya dari pemerintah kecamatan sebagai pembina Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) harus tegas dalam memilih dan menempatkan agen sesuai dengan bidangnya disesuaikan dengan ketentuan yang peraturan daerah yang berlaku.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di tiga desa yang menjadi sample penelitian dengan persentase 40 % dari total responden yang menyatakan bahwa program PDPGR telah terlaksanakan dengan efektif dan 60 % menyatakan tidak efektif. Terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi yaitu: kurangnya sosialisasi tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, Faktor dana yang belum

terealisasi karena dialihkan untuk dana Covid-19 dan kurangnya koordinasi antara agen pemberdayaan gotong royong dengan Pemerintah Desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani, 2019, *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang*, Jurnal Civic Hukum, Vol. 4 No.2 November 2019

Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung

Safi'i, 2011, *Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif Teori dan Praktek*, Averroes Press, Malang

Soetomo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

RPJMD, Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021